

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA MASA KOLONIALISME BELANDA DI INDONESIA

Abdul Muid,¹ Muhammad Ulul Albab,² Masnur Asroful ibad,³

Abdul1muid@gmail.com
ululbungah@gmail.com
masnurasyrofulibad@gmail.com

UNIVERSITAS QOMARUDDIN

Abstrak:

Pada masa penjajahan Belanda, pendidikan Islam di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan. Kebijakan pemerintah kolonial berdampak besar pada pendidikan Islam. Meskipun ada pembatasan terhadap aktivitas keagamaan, pendidikan menjadi sasaran untuk dibekukan oleh penguasa kolonial. Namun, dominasi kaum intelektual Muslim Indonesia yang menolak kehadiran kolonialisme membuat upaya ini sulit dilakukan oleh para penjajah. Kaum intelektual Muslim berusaha membentuk organisasi-organisasi Islam sebagai sarana untuk memberikan pemahaman kepada umat. Organisasi seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) memiliki karakteristik yang berbeda dalam menyebarkan pemahaman agama. Muhammadiyah, yang berbasis di perkotaan dan dikelola oleh kaum intelektual, berbeda dengan NU yang berbasis di pedesaan dan agraris serta memiliki tradisi mistik. Pesantren juga menjadi lembaga pendidikan Islam yang konsisten dalam mengembangkan Islam dan menentang kolonialisme pada masa itu. Semua ini mencerminkan perjuangan dan semangat yang berbeda dalam menghadapi penjajahan dan memperkuat eksistensi pendidikan Islam di Indonesia.

Kata Kunci: Pendidikan Islam, kolonialisme, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, pesantren

PENDAHULUAN

Pada masa penjajahan Belanda, pendidikan Islam di Indonesia mengalami perubahan besar. Kebijakan pemerintah kolonial berdampak besar terhadap pendidikan Islam. Meskipun kegiatan keagamaan dibatasi, pendidikan ditangguhkan oleh otoritas kolonial. Namun dominasi intelektual Muslim Indonesia yang menolak adanya kolonialisme membuat upaya tersebut sulit dilakukan oleh para penjajah. Para intelektual Muslim berusaha mendirikan organisasi-organisasi Islam untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Organisasi seperti Muhammadiyah dan

¹ Dosen Pascasarjana Universitas Qomaruddin Bungah Gresik, Dosen STAI Arrosyid Surabaya, Anggota Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Gresik, Kabid Pendidikan Dewan Masjid Kabupaten Gresik, Pengurus Aswaja Center PCNU Kabupaten Gresik, Pengasuh Pondok Pesantren Maziyatul Ilmi Menganti Kabupaten Gresik, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Furqon NU Driyorejo Kabupaten Gresik, Wakil Ketua MWCNU Kecamatan Menganti, Anggota Pengurus Komnasdik Kabupaten Gresik.

² Mahasiswa semester IV Universitas Qomaruddin

³ Mahasiswa semester IV Universitas Qomaruddin

Nahdlatul Ulama (NU) memiliki karakteristik berbeda dalam menyebarkan paham keagamaan. Muhammadiyah yang berbasis di perkotaan dan dijalankan oleh kaum intelektual, berbeda dengan NU yang berbasis di pedesaan dan memiliki tradisi agraris dan mistik. Pesantren juga menjadi lembaga pendidikan Islam yang secara konsisten berkomitmen terhadap pengembangan Islam lebih lanjut dan perlawanan terhadap penjajahan. Semua ini mencerminkan berbagai perjuangan dan gagasan yang digunakan untuk melawan kolonialisme dan memperkuat kehadiran pendidikan Islam di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode yang digunakan untuk menganalisis data yang dikumpulkan adalah metode deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan kualitatif, Dalam metode ini penulis mengumpulkan data dari berbagai literatur atau referensi, menganalisis dan menjelaskannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. SEJARAH PERKEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM PADA MASA PRA KOLONIALISME

Sejarah Perkembangan Pendidikan Islam Sebelum Penjajahan Pendidikan Islam pada masa Kerajaan Islam Indonesia, khususnya:

Pertama, Kerajaan Islam Aceh. Kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah Kerajaan Samudera Pasay di wilayah Aceh yang berdiri pada abad ke 10 M. Raja pertama adalah Al Malik Ibrahim bin Mahdun, raja kedua adalah Al Malik al pada tahun . Malik Sabbar Syah (1444 M/abad s/d 15H). 5 Seorang musafir bernama Ibnu Batutah dari Maroko pada tahun 1345 M singgah di Kerajaan Pasay dalam perjalanannya menuju Tiongkok pada masa pemerintahan al-Malik al-Zahir pada tahun M. Ibnu Battuta mengatakan bahwa beliau sangat mengagumi Kerajaan Samudera Pasay. Di Kerajaan Pasay, raja memiliki ilmu agama yang tinggi, menganut aliran Syafi'i, fasih berbahasa Arab, dan menjalankan gaya hidup sederhana. Berdasarkan pendapat Ibnu Batutah, hal tersebut dapat ditelusuri dari sistem pendidikan yang berlaku pada masa kerajaan Samudera Pasay. Artinya, Materi pendidikan dan petunjuk agama di bidang syariat adalah fiqih Syafi'i.

Yang kedua adalah kerajaan Islam di pulau Jawa. Sri Kertabumi, salah satu raja Majapahit, mempunyai istri muslim bernama Putri Chenpa. Putri Chenpa mempunyai seorang putra bernama Raden Fatah, yang kemudian menjadi raja kerajaan Islam pertama di Jawa, Kerajaan Demak, pada tahun 1478. Para ahli sejarah berbeda pendapat mengenai berdirinya Kerajaan Demak pada tahun 1478. Ada pula yang berpendapat bahwa Kerajaan Demak berdiri pada tahun 1478, M. Pendapat ini didasari oleh runtuhnya kerajaan Majapahit. Ada pula orang yang meyakini Kerajaan Demak didirikan antara tahun 1478 hingga 1518 Masehi. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa tahun ini adalah tahun 1478, ketika pasukan Raden Fatah menyerbu dari Demak dan berakhirnya masa pemerintahan Prabu Air Brawijaya VII. Dengan berdirinya Kerajaan Islam Demak, kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, penyebaran agama Islam semakin meluas dan pendidikan serta pendidikan Islam semakin maju. Masjid-masjid didirikan di pusat-pusat pendidikan di sana pusat pendidikan dan pendidikan agama yang dipimpin oleh Badal, sumber agama Islam. Para wali daerah diberi gelar resmi yaitu gelar Sunan. Nanti akan dibubuhi nama daerahnya (misalnya Sunan Gunung Jati).

Ketiga, Kerajaan Islam Maluku. Islam masuk ke Maluku sejak masa Sunan Giri dari Malaka dan melalui Mubarrig dari Jawa pada tahun 1465. Raja Maluku pertama yang masuk Islam adalah Sultan Ternate yang disebut Marhum, dari tahun 1465 hingga 1486 M, di bawah pengaruh Maulana Husein, seorang saudagar asal Jawa yang terkenal dalam bidang agama. Pendidikan dan Dakwah Islam Sultan Zainul Abidin 1486- M 1500 Penyebaran Islam di Maluku mengalami dua kesulitan. oleh orang-orang yang masih menganut animisme, dan satu lagi oleh orang Portugis yang merupakan orang Maluku. Portugis. Misionaris Katolik pertama di Maluku adalah Franciscus Xaverius pada tahun 1546. Ia berhasil membuat sebagian penduduk Maluku memeluk agama Katolik. Ketika umat Kristen Protestan Belanda datang ke Indonesia, protes terhadap penduduk Indonesia dimulai pada awal abad ke-17 pada tahun 1600 M.

B. BERDIRINYA ORGANISASI ISLAMPADA ERA KOLONIALISME

Latar belakang sejarah. Lahirnya Muhammadiyah dan NU hadirnya kolonialisme membawa dampak yang sangat serius terhadap sistem kehidupan sosial keagamaan umat Islam bahkan terhadap tatanan komersial dan politik umat Islam. Antara tahun 1830 dan 1870, lahirnya Cultuur Stelsel (tanam paksa) pada tahun 1830 merupakan wujud perbudakan dan hancurnya semangat dan perekonomian bangsa Indonesia pada tahun 1830. Di sisi lain, tindakan Belanda yang membatasi

kehidupan beragama umat Islam merupakan simbol intervensi era kolonial terhadap politik dan agama negara Indonesia. Hal ini menjadi jelas pada tahun 1882 M ketika penguasa kolonial Belanda mulai mendirikan lembaga khusus yang bertugas mengawasi kehidupan umat Islam, yaitu Priestrade. Dari lembaga tersebut, diterbitkan berbagai peraturan pada tahun 1905, yang mewajibkan siapa pun yang ingin mengajar atau mempelajari Islam harus terlebih dahulu mendapat izin dari Belanda. Pada tahun 1925, peraturan yang lebih ketat mulai berlaku yang menyatakan bahwa tidak semua guru agama Islam diperbolehkan memberikan pelajaran mengaji kecuali mereka telah "mendapatkan" izin atau rekomendasi dari penguasa kolonial.

Kebencian terhadap gerakan Islam, penguatan Belanda untuk mendiskreditkan sekolah Islam, terutama penghapusan dan penutupan madrasah, sekolah Islam tanpa izin, atau pemberian bahan ajar yang tidak disukai penjajah Belanda. Pada saat itu, sekolah tersebut dikenal dengan nama Wilde School Ordonantie 5 . Meski demikian, kebangkitan semangat untuk melanjutkan pengajaran dan pendidikan Islam di kalangan umat Islam Indonesia justru semakin besar. Pada saat itu, masyarakat Islam semakin mengandalkan madrasah dan pesantren sebagai tempat anak-anak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini semakin menguatkan teori Wertheim bahwa politik apapun yang dilakukan penguasa non-Muslim terhadap umat Islam sebenarnya berbeda dengan apa yang ingin dicapai penguasa tersebut. Di antara tersebut, tujuh orang kenamaan Indonesia yang pernah menuntut ilmu di Mekkah antara lain adalah H. Abdul Karim Amrullah (ayah dari Buya Hamka), yang mengajar di Jembatan Besi Padang Panjang di Kentucky; Ahmad Dahlan (pendiri Muhammadiyah), warga Kauman Yogyakarta, dan KH. solo Adnan. 8 KH juga disertakan. Hashim Asiari merupakan pendiri Pondok Pesantren Tebuilen dan salah satu pendiri NU. 9 Situasi ini juga didukung oleh dampak reformasi yang terjadi di belahan dunia Muslim lainnya, seperti Mesir, Turki, Arab Saudi, dan Pakistan. Kemudian muncullah kelompok Muhammadiyah yang murni keagamaan, yang lebih mementingkan gerakan Puritan untuk membersihkan syiar-syiar agama Islam, yaitu Haul, Manaqib, melaksanakan salat, dan lain-lain. Lahirnya Muhammadiyah mempunyai dampak sosial. yakni merosotnya ikatan paternalistik Santri-Kai dan semakin merosotnya wibawa pesantren .

Muhammadiyah kemudian melahirkan 4.444 lembaga dan tradisi baru, diiringi 4.444 gerakan yang lebih modern. Kalau Muhammadiyah bergerak ke arah keagamaan, maka SI lebih ke arah

ekonomi dan politik. Di antara dua pola gerakan yang disebutkan di atas, NU muncul sebagai antitesis terhadap orientasi gerakan SI dan Muhammadiyah. Menurut Kontowijoyo, motivasi berdirinya NU Ioni tahun adalah sebagai berikut: Pertama, ketidakpuasan NU terhadap politisasi agama yang dilakukan SI, dan kedua, reaksi NU terhadap gerakan pembaharuan yang anti-paternalis dan non-Mazhab Muhammadiyah .

C. POTRET PENDIDIKAN PADA MASA KOLONIAL BELANDA

Pada tanggal 17 September 1901, Ratu Wilhelmina yang baru saja naik takhta menyatakan dalam pidatonya tahun pada pembukaan Parlemen Belanda bahwa pemerintah Belanda mempunyai amanat moral dan kewajiban untuk berterima kasih kepada Belanda (een eer Schuld).) ditekankan. Masyarakat Pribumi Hindia Belanda. Ratu Wilhelmina menerjemahkan seruan moral tersebut ke dalam pedoman etika dan politik, yang terangkum dalam program "Triaspolitica", yang meliputi:

1. Badan air untuk keperluan pertanian dan Irigasi, pembangunan dan rehabilitasi bendungan
2. Emigrasi akni mengajak penduduk untuk transmigrasi
3. Perluasan di bidang pendidikan dan pendidikan (edukasi).

Banyak orang mengaitkan kebijakan politik baru Belanda ini dengan gagasan dan tulisan Van Deventer yang diterbitkan beberapa waktu lalu. Sebelum Van Deventer kemudian dikenal sebagai pencetus kebijakan etis . Pengaruh kebijakan etis dalam bidang pendidikan dan pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perkembangan dan perluasan dunia pendidikan dan pendidikan di Hindia Belanda. Salah satu dari kelompok etika yang berpengaruh dalam bidang ini adalah J.H. Abendanon (1852-1925) menjabat sebagai Menteri Kebudayaan, Agama dan Kerajinan selama lima tahun (1900-1905). Sejak tahun 1900, 4.444 sekolah telah didirikan untuk kaum bangsawan dan 4.444 rakyat jelata, tersebar hampir merata di seluruh wilayah. Selain pendidikan, kebijakan politik etis juga mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat adat, misalnya melalui pembangunan fasilitas irigasi, pembentukan bank kredit bagi penduduk, dan subsidi terhadap industri dan kerajinan adat. . Sedangkan di masyarakat terjadi semacam pertukaran intelektual antara Belanda dan pribumi.

Politik Etis pendukung khawatir warga setempat menghadapi diskriminasi sosiokultural. Untuk mencapai tujuan ini, mereka berupaya menyadarkan masyarakat adat untuk membebaskan diri

dari perbudakan feodal dan berkembang sesuai model Barat, yang mencakup proses emansipasi dan tuntutan akan pendidikan untuk kemandirian. Pada tahun 1907, pembangunan sistem sekolah di Jawa dimulai. Yaitu ketika Belanda mendirikan 122. sekolah desa tiga tahun yang kemudian disebut sekolah dasar. 19 Sekolah-sekolah ini tersebar di desa-desa di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Bahasa pengantar pelajaran adalah bahasa Jawa, bukan bahasa Belanda. Lulusan sekolah ini berkesempatan untuk bersekolah di "Sekolah Lanjutan " bernama Vervelgschool. Sekolah-sekolah ini biasanya berlokasi di distrik sekolah tertentu atau distrik sekolah . Pada masa penjajahan Belanda, terdapat beberapa sekolah, antara lain: Pertama adalah Hollands-Inlandshe School (HIS) yang didirikan pada tahun 1912. Sekolah ini memiliki kurikulum 7 tahun dan dirancang khusus untuk siswa Indonesia yang berasal dari keluarga terpandang baik dari segi status, silsilah, pendapatan dan pendidikan. 20 Bahasa yang digunakan di sekolah ini adalah bahasa Belanda. 21 Yang kedua adalah Sekolah Syekh atau Sekolah Penghubung , yang didirikan pada tahun 1921. Sekolah ini merupakan kelanjutan dari lulusan Vervelgschool pada tahun . Durasi belajar bahasa Belanda di sekolah ini adalah 3 tahun. Lulusan sekolah ini setara dengan HIS . 22 Pada tahun 1940, jumlah sekolah tersebut berjumlah 4.444, mencapai 52 dengan jumlah populasi siswa 5.750.

KESIMPULAN

Meski pemerintah kolonial berusaha membatasi kegiatan keagamaan, para intelektual Muslim Indonesia terus berjuang memperkuat pendidikan Islam. Organisasi seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) berperan penting dalam menyebarkan paham keagamaan. Pondok pesantren juga secara konsisten berkomitmen terhadap pengembangan Islam lebih lanjut dan perlawanan terhadap kolonialisme. Semuanya mencerminkan pemikiran dan perjuangan yang berbeda dalam menghadapi kolonialisme dan mempertahankan pendidikan Islam di Indonesia.

REFERENSI

Soekarno, M. (2019). *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hefner, R. W. (1985). *Islam in an Era of Nation-States: Politics and Religious Renewal in Muslim Southeast Asia*. Honolulu: University of Hawaii Press.

Hasnida, H. (2017). SEJARAH PERKEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA PADA MASA PRA KOLONIALISME DAN MASA KOLONIALISME (BELANDA, JEPANG, SEKUTU). *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 16(2), 237–256. <https://doi.org/10.15408/kordinat.v16i2.6442>

Rohani, R., Ernita, M., & Salmiah, S. (2022). PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA PADA MASA KOLONIAL BELANDA (Kasus Muhammadiyah Dan NU). *Nusantara; Journal for Southeast Asian Islamic Studies*, 18(2), 103. <https://doi.org/10.24014/nusantara.v18i2.21483>